



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22541-22548

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kepatuhan Dalam Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan *GRI Standard* pada Perusahaan Pariwisata di BEI

Marisa Dwi Irmawati¹, Utami Puji Lestari²

¹²Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta
marisa.dwi.irmawati.ak22@mhs.wpnj.ac.id, utami.lestari@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan sektor pariwisata dengan mengacu pada *Global Reporting Initiative (GRI) Standard*, serta mengidentifikasi dimensi aspek pengungkapan yang paling banyak dan paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif komparatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan pada periode penelitian 2023 dan 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh hasil dua perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT Dyandra Media International Tbk. (DYAN), dengan teknik analisis yaitu analisis konten dan penilaian *binary score*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pengungkapan *sustainability report* kedua perusahaan masih tergolong rendah dengan kategori "*Limited Disclose*" dengan persentase tahun 2023 untuk PANR sebesar 28% dan DYAN sebesar 31%, sementara tahun 2024 meningkat untuk PANR menjadi 32% dan DYAN menjadi 39%. Pada pengungkapan standar universal tahun 2023, kedua perusahaan telah mengungkapkan secara terbatas dan memperoleh predikat "*Partially Applied*" dan meningkat pada tahun 2024 dengan memperoleh predikat "*Well Applied*" yang berarti telah melakukan pengungkapan hampir secara keseluruhan. Namun, pengungkapan pada standar spesifik dua periode 2023 dan 2024 masih terdapat variasi hasil pengungkapan pada dimensi ekonomi (GRI 200), dimensi lingkungan (GRI 300), dan dimensi sosial (GRI 400) pada perusahaan-perusahaan terkait, dengan dimensi lingkungan menjadi yang paling dominan diungkapkan oleh DYAN dan dimensi ekonomi menjadi dimensi dengan tingkat pengungkapan terendah pada kedua perusahaan.

Kata Kunci: Laporan Keberlanjutan, Tingkat Pengungkapan, Standar GRI, Perusahaan Sektor Pariwisata

1. Latar Belakang

Isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian di tengah ada ancaman perubahan iklim, pesatnya pertumbuhan, populasi global, dan meningkatnya angka kemiskinan [1]. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar laba, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasionalnya [2], sejalan dengan konsep *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) [3]. Adanya tuntutan tersebut melahirkan praktik pelaporan non-keuangan yang dikenal sebagai *sustainability report (SR)*, yaitu laporan publik yang berisi gambaran posisi dan kegiatan perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Dalam menyusun SR, perusahaan umumnya mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai indeks pengukuran yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan praktik bisnis [4]. *GRI Standard* telah diakui secara global yang digunakan untuk pedoman pelaporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan berlaku untuk semua entitas dan organisasi yang memiliki dampak dari aktivitas operasionalnya. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa sekitar 94% perusahaan tercatat telah melakukan pengungkapan SR pada tahun 2023 [5]. Hal tersebut sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, perusahaan publik, dan emiten yang terdaftar di BEI untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan [6].

Salah satu sektor yang berkembang pesat namun turut menimbulkan dampak keberlanjutan yang signifikan adalah sektor pariwisata. *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* mencatatkan kedatangan wisatawan global pada tahun 2024 mencapai 1,4 miliar dengan pendapatan pariwisata global sebesar US\$1,6 triliun [7]. Di sisi lain, *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* juga mencatatkan bahwa sektor pariwisata Indonesia turut mengalami peningkatan dengan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 36% dan wisatawan domestik sebesar 18% per tahun pada periode 2020-2024 [8]. Adanya peningkatan frekuensi aktivitas pariwisata tersebut menimbulkan dampak nyata, salah satunya pada aspek lingkungan. Secara global, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 5% emisi karbon dan telah menimbulkan dampak *triple planetary crisis*, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman perubahan iklim, dan adanya peningkatan polusi [9]. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan prinsip keberlanjutan serta pelaporan yang transparan pada sektor pariwisata.

Sebesar 90% perusahaan global tercatat telah menggunakan standar GRI untuk pelaporan SR, namun sektor pariwisata masih menjadi sektor dengan tingkat adopsi paling rendah dibandingkan sektor lainnya [10]. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pengungkapan SR berbasis GRI lebih banyak berfokus pada sektor manufaktur, energi, dan pertanian. Studi yang dilakukan oleh Keandre & Sukoharsono [1] pada perusahaan manufaktur menemukan bahwa beberapa indikator lingkungan belum diungkapkan secara detail, sementara kajian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. [11] menunjukkan pengungkapan indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial belum sepenuhnya dipenuhi. Selain itu, Hanafi et al. [2] mengungkapkan capaian kepatuhan penuh perusahaan sampel energi pada standar universal GRI meskipun standar spesifiknya masih bervariasi. Di samping masih bervariasinya hasil pengungkapan SR, Eriyanti & Fitri [12] juga menegaskan bahwa pengungkapan SR turut memengaruhi legitimasi dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang baik dan tepat dari para pemangku kepentingan terkait strategi keberlanjutan, dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnisnya dapat menciptakan ketimpangan dan degradasi sumber daya [13].

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, kajian yang secara spesifik menganalisis pengungkapan SR berbasis standar GRI pada sektor pariwisata masih sangat terbatas, sehingga masih terdapat gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan *sustainability report* perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di BEI berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Standard* pada periode 2023–2024, serta mengidentifikasi dimensi aspek pengungkapan yang paling banyak dan paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Legitimacy Theory

Legitimasi digambarkan sebagai sebuah sistem pengelolaan yang berorientasi pada seberapa besar perusahaan berpihak kepada masyarakat [14]. Dengan kata lain, perusahaan berupaya agar aktivitas bisnis mereka dianggap sah oleh pihak luar dan perlu mengungkapkan komitmennya terhadap masyarakat yang dicapai melalui publikasi laporan keberlanjutan. Baik atau buruknya informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut dapat mempengaruhi tingkat legitimasi masyarakat terhadap perusahaan [1]. Ogunode [15] mengklasifikasikan dua perspektif teori legitimasi, yaitu *institutional level perspectives* (perspektif tingkat kelembagaan) dan *organizational level perspectives* (perspektif tingkat organisasi). Dengan teori ini, perusahaan bersedia untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka tanpa melanggar kedamaian yang ada, merusak kondisi lingkungan, dan norma sosial di masyarakat tempat mereka menjalankan operasional bisnisnya, serta menjadi motivasi perusahaan untuk mengungkapkan dan menyajikan informasi non-keuangan mereka melalui laporan keberlanjutan.

1.1.2 Stakeholders Theory

Menurut Iznillah et al. [16], *stakeholders theory* menekankan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan tidak sebatas tertuju pada pencapaian finansial, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lain yang kemudian disediakan dalam laporan keberlanjutan untuk ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Freeman mengelompokkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi dua kategori, yaitu *Primary Stakeholders* dan *Secondary Stakeholders*. *Primary Stakeholders* adalah kelompok yang berkaitan langsung dengan perusahaan, seperti *suppliers*, investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan *Secondary Stakeholders* merupakan kelompok yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan, seperti pemerintah, media, kompetitor, dan organisasi terkait lainnya. Melalui teori ini, perusahaan ditekankan untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyediakan informasi yang andal kepada para *stakeholders* dalam bentuk laporan keberlanjutan dan aktivitas keuangan perusahaan.

1.1.3 Triple Bottom Line Theory

Konsep *triple bottom line* yang digagas oleh Elkington ini berkaitan erat dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan laporan keberlanjutan [17]. Terdapat tiga aspek utama (3P) pada *triple bottom line*, yaitu: 1) *People*: Perusahaan dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Dalam menjalankan bisnisnya, selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga harus menjadikan masyarakat sebagai fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. 2) *Profit*: Perusahaan harus mencapai keuntungan yang optimal untuk mendukung perkembangan dan kelancaran operasional serta memastikan kewajiban terpenuhi dengan baik. 3) *Planet*: Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, partisipasi perusahaan dalam membantu memelihara kelestarian lingkungan sangat penting. Hal tersebut karena perusahaan telah memperoleh manfaat dari penggunaan lahan yang ada. Jadi, konsep ini menekankan bahwa dalam mengoptimalkan keuntungan (*profit*), perusahaan harus menjaga keseimbangan pada aspek bumi atau lingkungan (*planet*) dan kepedulian terhadap masyarakat (*people*). Salah satu caranya adalah dengan melakukan pelaporan keberlanjutan [18]

1.1.4 Sustainability Report

Sustainability reporting (SR) merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh organisasi untuk pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya secara terbuka, sehingga akan menunjukkan kontribusi positif atau negatif perusahaan terhadap Sustainability Development Goals (SDGs) [18]. Apriyanti et al. [4] berpendapat bahwa laporan keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan perusahaan sebagai media komunikasi kepada para pemangku kepentingan yang berisikan informasi mengenai kinerja lingkungan, tata kelola, dan tujuan dari sisi profitabilitas perusahaan yang didalamnya juga terdapat laporan terkait aspek sosial, keuangan, dan lingkungan. Dalam menyusun laporan keberlanjutan, terdapat beberapa kerangka acuan (*frameworks*) yang dapat digunakan, seperti yang diungkapkan Senanayake et al. [19] dan Rusu et al. [20], disimpulkan beberapa kerangka *sustainability reporting* yang dijadikan acuan dalam pengungkapan keberlanjutan, antara lain: *Global Reporting Initiative* (GRI); *Carbon Disclosure Project* (CDP); *Greenhouse Gas Protocol* (GHG Protocol); *Climate Disclosure Standards Board* (CDSB); *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB); *International Integrated Reporting Council* (IIRC); *Taskforce of Climate-related Financial Disclosure* (TCFD); *Taskforce of Nature-related Financial Disclosure* (TNFD); *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Seluruh kerangka pelaporan tersebut memiliki perbedaan pada fokus pengungkapannya, namun sama-sama digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

1.1.5 Global Reporting Initiative (GRI) Standard

Menurut GRI [10] *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah suatu standar pedoman yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk efek terhadap hak asasi manusia secara public. Panduan pertamanya diterbitkan pada tahun 2000 yang disebut sebagai GRI G1 yang merupakan *framework* global pertama yang menyediakan acuan untuk pelaporan keberlanjutan. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2021, dimana terjadi pembaruan besar pada tiga standar universalnya yang dikenal dengan sebutan Standar GRI 2021. Selanjutnya, pada tahun berikutnya standar GRI terus mengalami perkembangan berupa penambahan standar sektor.

Sebelum adanya Standar GRI 2021, standar GRI 2016 telah lebih dulu menjadi standar global yang digunakan oleh para perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Pembaharuan standar dilakukan secara signifikan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) terhadap standar universal. Revisi tersebut menghasilkan standar yang disebut sebagai Standar GRI 2021 yang lebih fleksibel namun lebih komprehensif dan dapat memudahkan semua organisasi untuk menerapkan standar universal pada laporan mereka [10]. Sistem GRI Standard 2021 disusun menjadi tiga seri, yaitu Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Nurrisa [21] metode ini digunakan dengan tujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena dan proses penelitiannya tidak dapat diukur menggunakan prosedur statistik atau metode pengukuran lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan analisis isi konten dan *scoring* untuk membantu menilai pengungkapan indikator keberlanjutannya. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dalam dua periode 2023-2024 dari perusahaan sektor pariwisata yang menjadi hasil dari metode *purposive sampling* yang dilakukan. Langkah yang dilakukan dalam proses analisis data terdiri dari tiga step, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memilah data terkait pengungkapan laporan keberlanjutan. Kedua, menyajikan Standar GRI ke dalam kertas kerja, melakukan penilaian dengan *binary score* pada setiap indikator pengungkapan. *Binary score* menurut

Azevedo et al. [22], merupakan sebuah teknik penilaian dengan memberikan skor untuk menyatakan indikator tersebut telah diungkapkan atau tidak. Langkah terakhir, yaitu menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh

2.1. Kategori Penilaian Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dalam melakukan penilaian seberapa tinggi tingkat pengungkapan pada setiap Standar GRI, penulis akan melakukan perhitungan persentase tingkat kepatuhan menggunakan rumus *Corporate Sustainability Index (CSI)*, sebagai berikut:

$$\text{GRI Indeks} = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkapkan}}{\text{Total indikator GRI yang relevan}} \times 100$$

Selanjutnya, untuk menentukan predikat yang sesuai dari hasil persentase pengungkapan berdasarkan nilai masing-masing standar, terdapat empat kategori predikat, yaitu:

1. 0% : Not Applied >> Sama sekali tidak dilakukan pengungkapan
2. 1-40% : Limited Disclose >> Telah dilakukan pengungkapan secara terbatas
3. 41-75% : Partially Applied >> Telah dilakukan pengungkapan secara sebagian
4. 76-99% : Well Applied >> Telah dilakukan pengungkapan hampir secara keseluruhan
5. 100% : Fully Applied >> Telah dilakukan pengungkapan secara keseluruhan/lengkap.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang digunakan, diperoleh dua perusahaan sampel dari 28 populasi perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di BEI, yaitu PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT Dyandra Media International Tbk (DYAN). Analisis dilakukan terhadap laporan keberlanjutan dan laporan tahunan kedua perusahaan pada periode 2023 dan 2024, sehingga diperoleh empat data pengungkapan. Pengungkapan dinilai menggunakan teknik *binary score* dan analisis konten terhadap Standar Universal GRI 2021 (GRI 2: Pengungkapan Umum sebanyak 30 item dan GRI 3: Topik Material sebanyak 3 item) serta Standar Spesifik sebanyak 84 item yang dibagi ke dalam dimensi ekonomi (GRI 200, 17 item), lingkungan (GRI 300, 31 item), dan sosial (GRI 400, 36 item), yang penerapannya disesuaikan dengan daftar topik material masing-masing perusahaan.

3.1 Tingkat Pengungkapan Keseluruhan

Rekapitulasi hasil analisis pengungkapan pada kedua periode tersaji sebagai berikut:

Table 1 Hasil Analisis Tingkat Pengungkapan Standar GRI 2021 PANR dan DYAN					
Indikator Pengungkapan	Total Item GRI 2021	PANR		DYAN	
		2023	2024	2023	2024
Standar Universal					
GRI 2: Pengungkapan Umum	30	20	23	18	25
GRI 3: Topik Material	3	3	3	2	3
Standar Spesifik					
GRI 200: Standar Spesifik Ekonomi	17	2	2	2	3
GRI 300: Standar Spesifik Lingkungan	31	3	5	8	9
GRI 400: Standar Spesifik Sosial	36	5	5	6	6
Total Pengungkapan	117	33	38	36	46
Tingkat Pengungkapan (%)		28%	32%	31%	39%

Sumber: Data diolah, 2026

Secara keseluruhan, PANR mencatatkan tingkat pengungkapan dari 28% pada tahun 2023 menjadi 32% pada tahun 2024, sedangkan DYAN meningkat dari 31% menjadi 39% pada periode yang sama. Meskipun terdapat peningkatan pada kedua perusahaan, keduanya masih berada pada kategori "*Limited Disclose*" untuk capaian keseluruhan, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan kedua perusahaan belum sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan Standar GRI 2021. Peningkatan yang terjadi lebih banyak didorong oleh perbaikan pada Standar Universal, sementara pengungkapan Standar Spesifik masih relatif terbatas pada kedua periode.

3.2 Kepatuhan Pengungkapan Standar Universal (GRI 2 dan GRI 3)

Table 2 Hasil Analisis Standar Pengungkapan Umum (GRI 2)

Indikator Pengungkapan	Total Item GRI 2021	PANR		DYAN	
		2023	2024	2023	2024
Organisasi dan Praktik Pelaporan	5	3	3	5	5
Aktivitas dan Pekerja	3	2	3	2	2
Tata Kelola	13	9	10	6	10
Strategi, Kebijakan, dan Praktik	7	5	6	4	7
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	2	1	1	1	1
Total Pengungkapan	30	20	23	18	25
Tingkat Pengungkapan (%)		67%	77%	60%	83%

Sumber: Data diolah, 2026

Pada pengungkapan umum (GRI 2), tingkat kepatuhan PANR dan DYAN pada tahun 2023 berada pada kategori “*Partially Applied*” dengan capaian masing-masing 67% dan 60%. Kedua perusahaan belum optimal mengungkapkan indikator terkait tata kelola, khususnya komunikasi masalah penting (GRI 2-16) dan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi (GRI 2-17), yang sama sekali tidak diungkapkan pada periode tersebut. Pada tahun 2024, kepatuhan meningkat signifikan menjadi kategori “*Well Applied*” dengan capaian 77% untuk PANR dan 83% untuk DYAN, didorong oleh penambahan pengungkapan pada bagian strategi dan kebijakan oleh DYAN serta bagian tata kelola oleh PANR. Namun, indikator GRI 2-30 mengenai perjanjian perundingan kolektif secara konsisten tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada kedua periode. Ditemukan pula inkonsistensi acuan standar, yaitu penggunaan campuran indeks GRI 2016 dan GRI 2021 pada laporan PANR, yang berpotensi mempersulit keterbandingan (*comparability*) antarperusahaan.

Table 3 Hasil Analisis Standar Topik Material (GRI 3)

Indikator Pengungkapan	Indeks GRI	PANR		DYAN	
		2023	2024	2023	2024
Proses untuk menentukan topik material	3-1	1	1	1	1
Daftar topik material	3-2	1	1	1	1
Manajemen topik material	3-3	1	1	0	1
Total Pengungkapan		3	3	2	3
Tingkat Pengungkapan (%)		100%	100%	67%	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Pada topik material (GRI 3), PANR mencapai kategori “*Fully Applied*” (100%) pada kedua periode, sedangkan DYAN berada pada kategori “*Partially Applied*” (67%) pada tahun 2023 sebelum meningkat menjadi “*Fully Applied*” (100%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, ditemukan catatan pada kualitas pengungkapan GRI 3-3 mengenai manajemen topik material: rujukan indeks pada laporan PANR tidak secara eksplisit dikaitkan dengan masing-masing dari tujuh topik material yang telah ditetapkan, sementara DYAN hanya mengaitkan satu dari lima topik materialnya (Ketenagakerjaan) dengan indikator ini pada tahun 2024, sehingga pengungkapan manajemen topik material belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pelaporan GRI.

3.3 Kepatuhan Pengungkapan Standar Spesifik

3.3.1 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 200: Ekonomi

Table 4 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Ekonomi

Indeks GRI	Indikator Pengungkapan	Total Item GRI 2021	PANR		DYAN	
			2023	2024	2023	2024
GRI 200: Topik Spesifik Ekonomi						
201	Kinerja Ekonomi	4	1	1	1	1
203	Dampak Ekonomi Tidak Langsung	2	0	0	1	1
205	Antikorupsi	3	1	1	0	1
Total Pengungkapan (17 Indikator)			2	2	2	3
Tingkat Pengungkapan (%)			12%	12%	12%	18%

Sumber: Data diolah, 2026

Dimensi ekonomi (GRI 200) merupakan dimensi dengan tingkat pengungkapan stagnan pada kedua perusahaan di tahun 2023, yaitu sebesar 12%. Kemudian pada tahun 2024, PANR masih stagnan dicapai persentase 12% dan 18% untuk DYAN. Rendahnya pengungkapan ini disebabkan oleh sebagian besar informasi ekonomi dan keuangan yang telah dilaporkan secara terpisah pada laporan keuangan (*financial statement*), sementara indikator implikasi risiko iklim (201-2), kewajiban program pensiun (201-3), dan kontribusi pajak (207) sama sekali tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada dua periode penelitian. Dengan capaian tersebut, kedua perusahaan di dua periode dikategorikan ke dalam “*Limited Disclose*”

3.3.2 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 300: Lingkungan

Table 5 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Lingkungan

Indeks GRI	Indikator Pengungkapan	Total Item GRI 2021	PANR		DYAN	
			2023	2024	2023	2024
GRI 300: Topik Spesifik Lingkungan						
302	Energi	5	2	1	3	2
303	Air dan Efluen	5	1	1	1	1
304	Keanekaragaman Hayati	4	0	0	1	1
305	Emisi	7	0	3	1	3
306	Limbah	5	0	0	2	2
Total Pengungkapan (31 Indikator)			3	5	8	9
Tingkat Pengungkapan (%)			10%	16%	26%	29%

Sumber: Data diolah, 2026

Tingkat kepatuhan dimensi lingkungan (GRI 300) termasuk ke dalam kategori “*Limited Disclose*”. Pada aspek ini menunjukkan pola yang kontras antarperusahaan: PANR meningkat dari 10% menjadi 16%, terutama melalui pengungkapan topik Emisi (305) yang baru dimulai pada 2024, sedangkan DYAN secara konsisten unggul dengan capaian 26% meningkat menjadi 29%, mencakup hampir seluruh topik lingkungan (Energi, Air dan Efluen, Keanekaragaman Hayati, Emisi, dan Limbah) yang selaras dengan daftar topik material perusahaan. Di samping adanya penambahan indikator baru pada kedua perusahaan, ditemukan juga indikator yang sebelumnya diungkapkan menjadi tidak lagi diungkapkan. Salah satunya terdapat pada indikator 302-3 yang tidak lagi diungkapkan oleh DYAN tahun 2024. Selain itu, topik Material (301) juga tidak diungkapkan oleh dua perusahaan pada dua periode, karena mereka menilai topik tersebut kurang relevan dengan siklus bisnis mereka yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang tidak memiliki aktivitas produksi barang. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa cakupan pengungkapan pada standar spesifik sangat dipengaruhi oleh hasil identifikasi topik material masing-masing perusahaan, bukan semata-mata oleh ukuran atau jenis usaha.

3.3.3 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 400: Sosial

Table 6 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Sosial

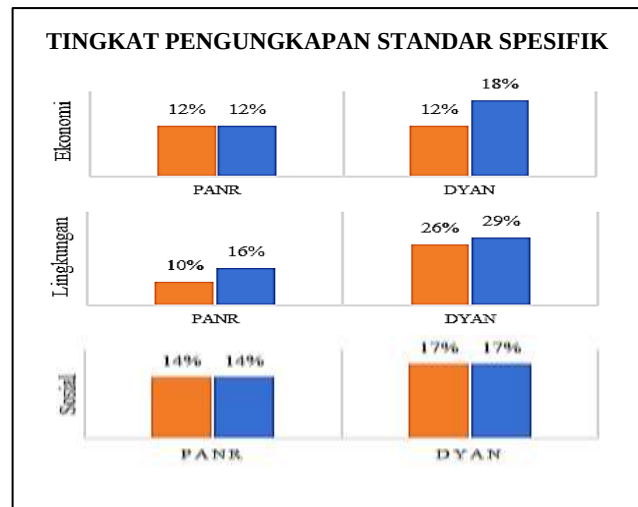
Indeks GRI	Indikator Pengungkapan	Total Item GRI 2021	PANR		DYAN	
			2023	2024	2023	2024
GRI 400: Topik Spesifik Sosial						
401	Ketenagakerjaan	3	2	1	2	2
403	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	10	1	2	2	2
404	Pelatihan dan Pendidikan	3	0	0	1	1
405	Keanekaragaman dan Peluang Setara	2	0	1	1	1
413	Masyarakat Setempat	2	1	1	0	0
416	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	2	1	0	0	0
Total Pengungkapan (36 Indikator)			5	5	6	6
Tingkat Pengungkapan (%)			14%	14%	17%	17%

Sumber: Data diolah, 2026

Pada dimensi sosial (GRI 400), kedua perusahaan menunjukkan capaian yang stagnan pada dua periode, yaitu 14% untuk PANR dan 17% untuk DYAN, dengan termasuk ke dalam kategori kepatuhan “*Limited Disclose*”. Temuan yang perlu menjadi perhatian adalah rendahnya pengungkapan pada topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (403), yang memiliki cakupan indikator terbanyak (10 item) sekaligus merupakan salah satu topik material bagi kedua perusahaan, namun baru diungkapkan satu hingga dua indikator saja. Kondisi ini berisiko memengaruhi penilaian pemangku kepentingan, khususnya karyawan dan regulator ketenagakerjaan, terhadap legitimasi operasional kedua perusahaan, karena idealnya topik tersebut menjadi salah satu isu paling sensitif secara sosial karena

berkaitan langsung dengan keselamatan manusia yang kaitannya dengan tenaga kerja. Pengungkapan pada dimensi sosial ini harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan serta dengan topik material dari masing-masing perusahaan.

Berikut hasil analisis perbandingan kedua perusahaan pada standar spesifik dalam bentuk grafik.



Gambar 1 Grafik Tingkat Pengungkapan Standar Spesifik

Dari grafik tersebut, dapat diidentifikasi adanya kenaikan pengungkapan signifikan antar periode. Pertama, pada dimensi ekonomi, dimana pengungkapan DYAN mengalami kenaikan yang awalnya 12% pada tahun 2023 menjadi 18% di tahun 2024. Kedua, pada dimensi lingkungan PANR meningkat dari 10% di 2023 menjadi 16% di tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik pengungkapan standar topik pada sektor pariwisata juga menunjukkan hasil yang masih beragam. Namun, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ye et al. [23] bahwa pada sektor pariwisata, area utama yang paling sering diungkapkan adalah pada topik lingkungan serta beberapa indikator pada topik sosial.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan *sustainability report* pada dua perusahaan sektor pariwisata yang menjadi sampel, yaitu PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), pada periode 2023 dan 2024 secara keseluruhan masih tergolong rendah dan berada pada kategori “*Limited Disclose*”. PANR dan DYAN sama-sama mencatatkan adanya peningkatan pengungkapan pada tahun 2024, dengan peningkatan pada kedua perusahaan lebih banyak didorong oleh perbaikan pengungkapan pada Standar Universal dibandingkan Standar Spesifik. Pada Standar Universal, pengungkapan umum (GRI 2) kedua perusahaan meningkat dari kategori “*Partially Applied*” pada tahun menjadi “*Well Applied*” pada tahun 2024, meskipun indikator GRI 2-30 mengenai perjanjian perundingan kolektif secara konsisten tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada kedua periode. Pada topik material (GRI 3), PANR telah mencapai kategori “*Fully Applied*” pada kedua periode, sementara DYAN meningkat dari kategori “*Partially Applied*” (67%) pada tahun 2023 menjadi “*Fully Applied*” (100%) pada tahun 2024, meskipun kualitas pengungkapan manajemen topik material (GRI 3-3) pada kedua perusahaan belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitannya dengan masing-masing topik material yang ditetapkan. Pada Standar Spesifik, pola pengungkapan PANR bervariasi antarperiode, dengan dimensi sosial sebagai capaian tertinggi pada tahun 2023 (14%) yang kemudian tergantikan oleh dimensi lingkungan pada tahun 2024 (16%), sedangkan dimensi ekonomi secara konsisten menjadi capaian terendah pada kedua periode. Sebaliknya, DYAN secara konsisten unggul pada dimensi lingkungan (26% pada tahun 2023 dan 29% pada tahun 2024) dan lebih rendah pada dimensi ekonomi maupun sosial. Indikator implikasi risiko iklim (201-2), kewajiban program pensiun (201-3), kontribusi pajak (207), serta topik material (301) menjadi indikator yang paling sedikit atau sama sekali tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada kedua periode penelitian, sehingga topik ekonomi (GRI 200) masih memerlukan perbaikan pengungkapan yang paling mendesak di antara ketiga dimensi Standar Spesifik. Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa identifikasi topik material saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan pelaporan Standar GRI 2021, karena pengungkapan manajemen dampak pada setiap topik material tersebut juga memerlukan kedalaman dan konsistensi acuan standar

yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh kedua w serta melengkapi data sekunder dengan data primer agar diperoleh gambaran kepatuhan pengungkapan yang lebih akurat dan representatif.

Referensi

1. K. Keandre and E. G. Sukoharsono, "Studi pengungkapan kinerja keberlanjutan pada PT Sido Muncul Tbk berdasarkan global reporting initiative (GRI) index periode 2020-2022," *REAKSI (Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sist. Informasi)*, vol. 3, no. 4, pp. 1050–1064, 2024, doi: 10.21776/reaksi.2024.3.4.409.
2. A. A. Hanafi, C. W. Lestari, E. M. Suwarno, and L. S. Arifin, "Analisis pengungkapan sustainability report berdasarkan GRI standards pada perusahaan energi," *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 326–343, 2025, [Online]. Available: <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB> Vol
3. N. Puspita and Jasman, "Pengaruh laporan keberlanjutan (sustainability report) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi," *J. KRISNA Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 63–69, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
4. I. B. Apriliyani, R. Farwitawati, and R. A. Nababan, "Analisis penerapan global reporting initiative (GRI) g4 pada laporan keberlanjutan sektor pertanian," *J. Akunt. Kompetif*, vol. 4, no. 1, pp. 136–145, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/666/496>
5. L. A. Putri, "Analisis komprehensif sustainability report pada perusahaan perbankan: perspektif kedalaman dan kualitas pengungkapan," Politeknik Negeri Jakarta, 2025. [Online]. Available: <https://repository.pnj.ac.id/eprint/30953>
6. Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik," *Otoritas Jasa Keuang.*, pp. 1–15, 2017.
7. P. Sarkar, "Global tourism returns to pre-pandemics levels in 2024: UN report", 2025. [Online]. Available: <https://www.travelandtourworld.com/news/article/global-tourism-returns-to-pre-pandemic-levels-in-2024-un-report/>
8. Kementerian Pariwisata, "Rencana strategis kementerian pariwisata 2025-2029," 2025. [Online]. Available: <https://api.kemenpar.go.id>
9. G. Awaliyah, "Emisi karbon pariwisata ditargetkan berkurang 50 persen pada 2030", 2026. [Online]. Available: <https://esgnow.republika.co.id/berita/s677sf463/>
10. GRI, "GRI standards 2021," in *Global Reporting Initiatives*, 2024, p. 958. [Online]. Available: <https://www.globalreporting.org>
11. W. H. Prasetyo, A. Andini, A. D. Haussain Irsyad, H. Holiawati, and E. Ruhayat, "Analisa kepatuhan sustainability reporting pada PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk berdasarkan GRI standards dan ISO AA1000AP pada tahun 2022," *Budg. J. Business, Manag. Account.*, vol. 5, no. 2, pp. 1451–1460, 2024, doi: 10.31539/budgeting.v5i2.9585.
12. Y. Eriyanti and A. Fitri, "Pengaruh pengungkapan sustainability reporting berdasarkan GRI standards terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi perusahaan non keuangan yang terdaftar pada indeks SRI-KEHATI tahun 2017-2019)," *J. Akunt. Trisakti*, vol. 9, no. 1, pp. 145–154, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v9i1.10272>.
13. Salihin, "Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap perekonomian lokal di kawasan wisata Pantai Senggigi, Lombok," *Tour. Hosp. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2025, doi: <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.53>.
14. M. P. Amira, H. N. L. Ermaya, and M. Miftah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi carbon emission disclosure," *Indones. J. Audit. Account.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–41, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.iapi.or.id/index.php/ijaa/article/view/57>
15. O. A. Ogunode, "Legitimacy theory and environmental accounting reporting and practice: a review," *South Asian J. Soc. Stud. Econ.*, vol. 13, no. 1, pp. 17–28, 2022, doi: 10.9734/sajsse/2022/v13i130345.
16. M. L. Iznillah, J. Saidi, M. Rasuli, and N. Nasrizal, "Reaksi investor terhadap corporate sustainability performance: a review of literature using stakeholder theory," *J. Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknol.*, vol. 4, no. 2, pp. 300–311, 2024, doi: 10.56870/4pce9r80.
17. S. W. Hapsari, "Sustainability report disclosure evaluation based on global reporting initiative (GRI standard (a case study at PT PLN (persero) 2017-2019)," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 9, no. 2, pp. 1–22, 2021, [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7571>
18. S. Farisyi, M. Al Musadieq, H. N. Utami, and C. R. Damayanti, "A systematic literature review: determinants of sustainability reporting in developing countries," *Sustain.*, vol. 14, no. 16, pp. 1–18, 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/su141610222>.
19. M. Senanayake, I. Harymawan, G. Dorfleitner, S. Lee, J. H. Rhee, and Y. S. Ok, "Toward more nature-positive outcomes: a review of corporate disclosure and decision making on biodiversity," *Sustain.*, vol. 16, no. 18, pp. 1–24, 2024, doi: 10.3390/su16188110.
20. T. M. Rusu, A. Odagiu, H. Pop, and L. Paulette, "Sustainability performance reporting," *Sustain.*, vol. 16, no. 19, 2024, doi: 10.3390/su16198538.
21. F. Nurrisa, D. Hermina, and Norlaila, "Pendekatan kualitatif dalam penelitian: strategi, tahapan, dan analisis data," *J. Teknol. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 2, no. 3, pp. 793–800, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/index>
22. G. Azevedo, J. Oliveira, I. Sousa, M. F. Borges, M. C. Tavares, and J. Vale, "Disclosure of sustainability information under the corporate social responsibility directive: the degree of compliance of portuguese stock index companies," *Int. J. Financ. Stud.*, vol. 13, no. 1, pp. 1–24, 2025, doi: 10.3390/ijfs13010013.
23. J. Ye, M. Sotiriadis, I. Dimou, S. Shen, and D. Koufopoulos, (2025). "Suggesting a tourism industry-specific environmental, social and corporate governance (ESG) reporting framework," *Tourism Management*, pp. 109, 2025, doi: 10.1016/j.tourman.2025.105156.